THE INDONESIAN FORUM (TIF) SERI KE-138

OTONOMI DI PERSIMPANGAN: TRANSFER KE DAERAH DAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Perspektif Fungsi Penganggaran & Pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen di Tengah Dinamika Kebijakan Fiskal Nasional 2026–2027

Muhammad Fauhan Fawaqi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen

PERGESERAN SENTRALISASI BELANJA PENDIDIKAN & PENYEMPITAN RUANG DAERAH

61,7%

Porsi Belanja Pemerintah Pusat

Dari Rp757,8 T anggaran pendidikan RAPBN 2026, mayoritas dikelola langsung K/L pusat (termasuk MBG Rp335 T).

33,4%

Porsi Transfer ke Daerah (TKD)

TKD pendidikan turun ±23,7%; mempersempit diskresi pemda dalam merespons kebutuhan lokal.

171/PUU-XXIV

Uji Materi UU HKPD di MK (2026)

Respons daerah & masyarakat sipil atas ketimpangan otonomi fiskal dan skema dana terikat (earmarked).

IMPLIKASI STRUKTURAL BAGI DAERAH (KABUPATEN KEBUMEN)

- **Dominasi Dana Terikat (Earmarked):** Komponen TKD pendidikan terserap untuk pos kaku seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dan BOS (DAK Nonfisik).
- **Sentralisasi Belanja Fisik:** Revitalisasi sarana prasarana sekolah kini banyak ditarik langsung melalui belanja kementerian/lembaga di pusat, mengurangi fleksibilitas perencanaan daerah.
- **Dilema Otonomi Daerah:** Kabupaten/kota memikul tanggung jawab operasional SD dan SMP, namun ruang fiskal murni untuk inovasi dan penanganan ketimpangan wilayah kian terbatas.

POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN KEBUMEN: KONSISTEN MELAMPAUI 35% APBD

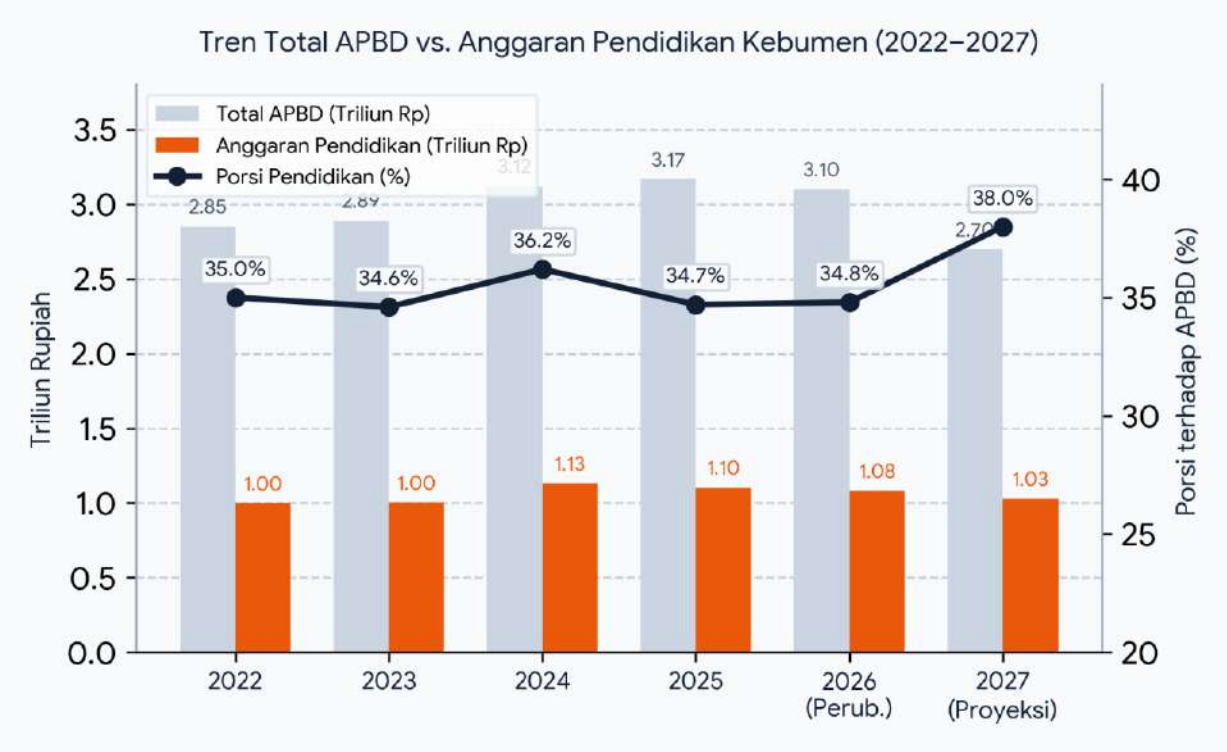

Komitmen di Atas Mandat Konstitusi

DPRD bersama TAPD menjaga alokasi fungsi pendidikan di kisaran Rp1,00 T – Rp1,16 T (35%–38% dari total APBD), jauh melampaui batas minimal 20%.

Paradoks Nominal vs. Ruang Fiskal

Lebih dari 65% anggaran pendidikan bersumber dari transfer pusat yang terserap belanja gaji/tunjangan guru ASN & PPPK, sehingga ruang belanja modal APBD murni sangat sempit.

Sinkronisasi Pokir & Musrenbang

DPRD mengawal pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses agar terintegrasi dalam KUA-PPAS, memprioritaskan rehabilitasi SD/SMP di wilayah pesisir selatan dan pegunungan utara.

DAMPAK PERUBAHAN ALOKASI TKD: DARI LEVERAGING 2026 KE TEKANAN 2027

TAHUN ANGGARAN 2026: POLA SINERGI & SENTRALISASI FISIK

- **Keterbatasan Belanja Modal APBD:**

APBD Kebumen hanya mampu mengalokasikan Rp16,33 miliar untuk perbaikan 210 satuan pendidikan (111 SD, 95 SMP, 2 PAUD, 2 Kesetaraan).

- **Lonjakan Via Dana Pusat (APBN):**

Kebumen memperoleh dana revitalisasi pusat sebesar Rp150,8 miliar untuk 242 sekolah beserta perlengkapan belajar.

- **Total Intervensi Naik 2,6x Lipat:**

Total dana fisik mencapai Rp167,22 miliar (444 sekolah). Pola ini mengonfirmasi temuan TII: anggaran fisik makin terpusat di K/L nasional.

PROYEKSI RAPBD 2027: KONTRAKSI FISKAL & RASIONALISASI

- **Pemangkasan TKD Rp324 Miliar:**

Proyeksi pendapatan daerah RAPBD 2027 menyusut ke kisaran Rp2,7 triliun (dengan PAD Rp582 miliar).

- **Koreksi Ulang KUA-PPAS 2027:**

Draf awal urusan pendidikan sebesar Rp1,027 triliun harus dihitung ulang oleh Banggar DPRD dan TAPD menyesuaikan pagu transfer terbaru.

- **Risiko Tertekannya Belanja Non-Gaji:**

Karena belanja gaji ASN/PPPK bersifat wajib dan tidak bisa dipotong, rasionalisasi berisiko menekan belanja pemeliharaan sekolah dan peningkatan mutu guru.

MENGAWAL EFEKTIVITAS BELANJA FISIK & PEMERATAAN MUTU ANTARWILAYAH

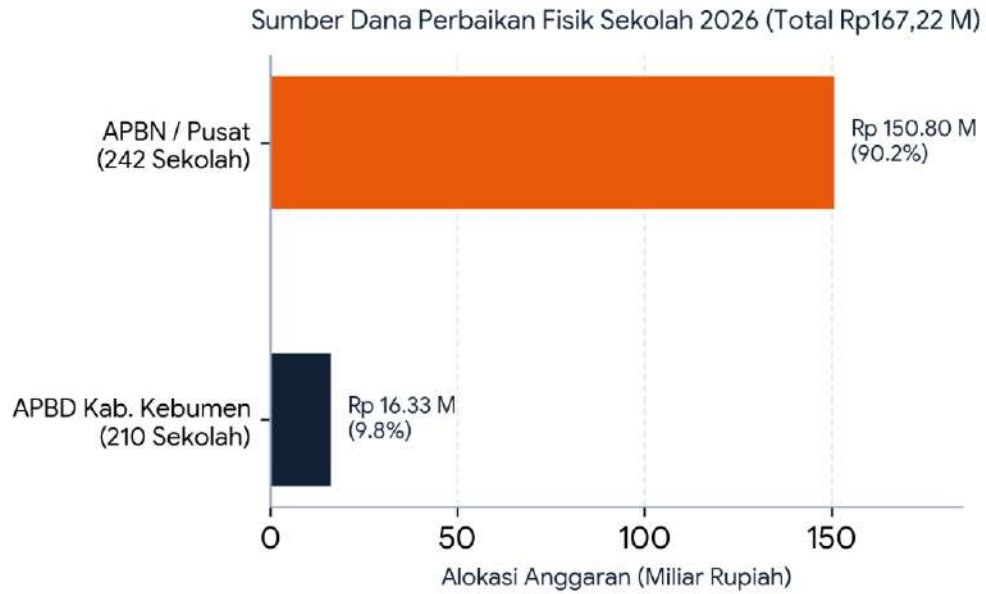

Fokus Pengawasan DPRD 2026:
90,2% dana perbaikan fisik sekolah (Rp150,8 M) berasal dari APBN. DPRD mengawal sinkronisasi data Dapodik agar sekolah rusak berat di Kebumen tidak terlewat.

01

Akselerasi Serapan Sejak Triwulan I

Mencegah penumpukan lelang dan pengerjaan rehabilitasi ruang kelas di akhir tahun anggaran yang rawan menurunkan kualitas konstruksi.

02

Uji Petik & Inspeksi Lapangan

Komisi terkait melakukan verifikasi fisik langsung ke sekolah penerima DAK maupun APBD untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis.

03

Pemerataan Distribusi Guru & Sarpras

Mengawasi penempatan guru ASN/PPPK agar tidak menumpuk di wilayah kota Kebumen, serta menjamin proporsionalitas bantuan bagi kecamatan pinggiran.

04

Pengawasan Perlindungan Siswa & Afirmasi

Mengawal penyaluran perlengkapan sekolah bagi ±1.000 siswa kurang mampu (sinergi APBD & CSR) serta efektivitas program pencegahan perundungan (anti-bullying).

EMPAT TANTANGAN DPRD DI TENGAH KETERBATASAN RUANG FISKAL DAERAH

1. Rigiditas Belanja Pegawai (PPPK)

Gelombang pengangkatan guru PPPK sejak 2023–2024 meningkatkan beban belanja pegawai secara permanen. Saat TKD dipangkas, belanja gaji tetap wajib dibayar sehingga menekan porsi belanja modal dan pelatihan guru.

2. Ketidakpastian Kebijakan Transfer Pusat

Perubahan pagu dan pemangkasan TKD (seperti koreksi Rp324 M pada RAPBD 2027) sering terjadi setelah dokumen perencanaan awal (RKPD/KUA-PPAS) disusun, mengganggu kesinambungan program multi-tahun.

3. Reduksi Makna Otonomi Penganggaran

Skema dana transfer yang sangat terikat (earmarked) membuat fungsi penganggaran DPRD lebih banyak bersifat administratif ('menyalurkan pos wajib pusat') dibanding merancang inovasi lokal.

4. Kapasitas PAD yang Belum Memadai

Dengan proyeksi PAD Kebumen di kisaran Rp582 miliar, kemampuan fiskal mandiri daerah belum cukup untuk menambal kekurangan dana rehabilitasi ratusan sekolah tanpa dukungan transfer pusat yang adil.

MENJAGA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN & KESEIMBANGAN OTONOMI FISKAL

A. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

- **Jaminan Pendanaan Penuh Gaji PPPK:** Formasi PPPK yang ditetapkan pusat harus diiringi alokasi DAU Specific Grant yang menutup 100% beban gaji dan tunjangan tanpa menggerus ruang belanja modal daerah.
- **Relaksasi Fleksibilitas TKD Pendidikan:** Memperluas ruang diskresi penggunaan DAK dan DAU pendidikan agar pemda dapat menyesuaikan intervensi dengan tipologi geografis dan kebutuhan lokal.
- **Sinkronisasi Program Nasional (MBG & Revitalisasi):** Memastikan alokasi program prioritas nasional dalam pos pendidikan tidak mengurangi jatah transfer dasar pemeliharaan sekolah di daerah.

B. Langkah Strategis DPRD & Pemkab Kebumen

- **Tajamkan Skala Prioritas di RAPBD 2027:** Melakukan realokasi belanja operasional non-prioritas untuk melindungi anggaran rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan bantuan siswa miskin.
- **Optimalisasi Sinergi APBN & CSR:** Memperkuat akurasi basis data Dapodik untuk menjemput dana revitalisasi kementerian serta mengarahkan CSR perusahaan daerah/swasta ke sektor pendidikan.
- **Audit Efektivitas Belanja Pendidikan:** Mendorong pergeseran orientasi pengawasan dari sekadar serapan anggaran menuju capaian mutu literasi, numerasi, dan angka melanjutkan sekolah.

“Anggaran pendidikan di daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka formal 20% atau sekadar pos administrasi belanja pegawai. Otonomi fiskal yang sehat menuntut ruang gerak yang memadai agar DPRD dan Pemerintah Daerah mampu menjawab kebutuhan riil setiap ruang kelas di pelosok Kebumen.”